

**IMPLEMENTASI DIKDA DALAM APBD SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN  
PENCAIRAN PEMBIAYAAN KEGIATAN BELANJA RUTIN PADA  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**

KK  
A. 28/99  
Nuz  
E



**MILIT  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**Diajukan oleh :**

**CAROLUS BOROMIUS BAMBANG NURCAHYO**

**No Pokok : 049320084 E**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI DIKDA DALAM APBD SEBAGAI ALAT  
PENGENDALIAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN KEGIATAN  
BELANJA RUTIN PADA PEMERINTAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MALANG**

KK  
A.28/99  
Nur  
C'

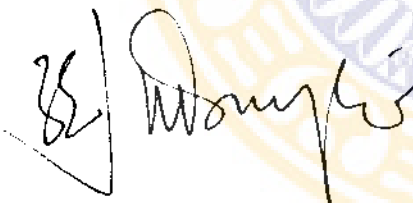
**DIAJUKAN OLEH :**

**CAROLUS BOROMIUS BAMBANG NURCAHYO**

**No.Pokok: 049320084E**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

**DOSEN PEMBIMBING,**

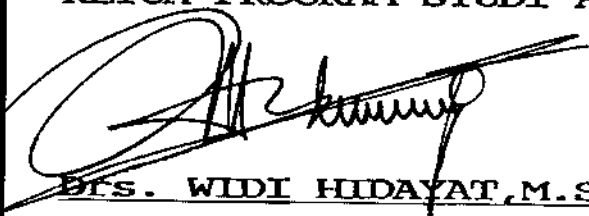


**Dra. ERINA SUDARYATI, M.Si, Ak.**



**TANGGAL.** 16/2/99

**KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,**



**Drs. WIDI HIDAYAT, M.Si., Ak.**

**TANGGAL.** 16/3/99

**ABSTRAK**  
**SKRIPSI SARJANA EKONOMI**

Nama : C.B.Bambang Nurcahyo  
 N.I.M : 049320084E

Judul : Implementasi DIKDA Dalam APBD Sebagai Alat Pengendalian Pencairan Pembiayaan Kegiatan Belanja Rutin Pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang

Keuangan daerah merupakan segi yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dibutuhkan sistem pengawasan dan pembinaan administrasi yang baik dan berkelanjutan. Pembuatan DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) dalam program tribulanan merupakan salah satu upaya yang mungkin dapat digunakan mengawasi pelaksanaan administrasi Keuangan Daerah. Sasaran akhir dibuatnya DIKDA yang baik adalah disamping terjaminnya harta kekayaan pemerintah juga keseimbangan dalam penyerapan dana yang sudah ditetapkan setiap tribulannya. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Dati II Malang, khususnya pada unit sekretariat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah DIKDA sudah digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pembiayaan anggaran belanja rutin sehingga bila terjadi perbedaan antara program tribulanan yang sudah dibuat dengan realisasi pembiayaannya masih dalam batas-batas toleransi penilaian.

Di dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan penulis mengumpulkan data dengan metode yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara sebagai berikut : Observasi Langsung, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa data, penulis telah melakukan pengujian, yaitu dengan cara membandingkan laporan realisasi pencairan pembiayaan anggaran belanja rutin tahun anggaran 1995/1996 dengan DIKDA (laporan tribulan) tahun anggaran yang sama yang telah disetujui oleh kepala daerah.

Kesimpulan menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang utamanya pada Unit Sekretariat kurang tertib. Khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan kegiatan Anggaran Belanja Rutin yang belum secara efektif mempergunakan DIKDA < Program Tribulanan > sebagai alat pengendalian pencairan pembiayaan kegiatan tersebut, sehingga pada tiap akhir tribulan terjadi perbedaan antara realisasi pembiayaan kegiatan anggaran belanja rutin dengan program tribulanan yang sudah dibuat dan perbedaan yang terjadi cenderung diluar toleransi penilaian, akibatnya lebih lanjut antara lain adanya penggunaan anggaran belanja rutin diluar ketentuan selama masa anggaran yang menyebabkan SPJ nya kurang dapat dipertanggung jawabkan.